

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat

Pengamat: Beban Subsidi Energi Mengintai APBN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Nilai tukar Rupiah kembali berada di bawah tekanan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah berada di level Rp17.614 per Dolar AS, melemah 3 poin atau sekitar 0,02 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Bersambung ke
Halaman 11

Tegakkan Inpres Karhutla, KLH Segel 50 Badan Usaha dan Tetapkan 138 Tersangka

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total area konsesi yang terbakar dan menjadi objek penindakan mencapai 27.333,79 hektare.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan penindakan tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan

Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Menurut

Bersambung ke
Halaman 11

PRABOWO COPOT PURBAYA APA SALAHNYA?

JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dalam perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin

(14/9/2026). Posisi Purbaya sebagai bendahara negara digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara, sebagai menteri keuangan kabinet

merah-putih, dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029, terlebih dulu saya bertanya kepada saudara," kata Prabowo saat mengambil sumpah jabatan

Bersambung ke
Halaman 11





Guntur Romli Kritik Kebijakan 200 Juta Rekening Massal Jelang 2029

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli mengkritisi kebijakan pembukaan rekening massal untuk 200 juta orang dengan anggaran Rp 11 triliun. Guntur Romli mengatakan Rp 11 triliun uang rakyat, akan digelontorkan untuk membeli rekening.

Dia menyinggung uang yang harus menanggung di rekening bank, sebesar Rp 50 ribu. Guntur Romli menyebut hasil perkalian Rp 50 ribu dengan 200 juta, sebesar 10 triliun. "Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak bisa menjelaskan ke mana Rp 1 triliun pergi, biaya admin bank? Proyek siluman?" katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (14/9).

Guntur Romli menyentil pertanyaan ekonom Berly Martawardaya yang membongkar kejanggalan itu, melalui tulisan di media sosial X. Berly mempertanyakan alasan pemerintah lebih mudah mengalokasikan Rp 11 triliun untuk program ini, daripada penanganan bencana gempa dan karhutla.

Kemudian, tidak adanya penyesiran dahulu terhadap WNI yang sudah punya rekening di Bank Himbara, supaya tidak dobel dan bisa mengurangi biaya. Guntur Romli menyampaikan program dengan biaya Rp 11 triliun yang hanya menghasilkan saldo Rp 50 ribu per orang, adalah simbol kebijakan tanpa desain matang.

Dia mengatakan proyek jumbo itu digelar tiga tahun menjelang 2029. Guntur Romli menduga kebijakan itu pemborosan berkedok Bansos. "Ini pemborosan berkedok Bansos. ● (Egi)

Mahfud MD Nilai Kepala BGN Gagal Atasi Keracunan MBG, Korban Tembus 51 Ribu



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono belum berhasil mengatasi persoalan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mahfud menyoroti jumlah korban keracunan yang terus meningkat sejak program tersebut dijalankan.

Berdasarkan data yang diterimanya, pada tahun pertama pelaksanaan MBG terdapat 12.658 orang yang terdampak keracunan.

Namun, hingga awal September 2026, jumlah anak yang terdampak keracunan disebut telah mencapai sekitar 51.000 orang.

Lonjakan tersebut membuat Mahfud menilai persoalan keracunan dalam program MBG bukan lagi sekadar insiden sesaat.

Menurut dia, peningkatan

jumlah korban menunjukkan adanya persoalan yang berlangsung secara berkelanjutan dan membutuhkan pembenahan serius.

"Sudaryono menurut saya bagus. Kepala MBG-nya bagus. Tetapi, dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu," kata Mahfud MD dalam sinar YouTube, Minggu (13/9/2026).

Mahfud menyebut Sudaryono belum berhasil menjalankan tugas utama yang dibebankan kepadanya, yakni memperbaiki pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih baik dan mampu mencegah terulangnya kasus keracunan.

Meski demikian, Mahfud menegaskan persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada sosok Sudaryono.

Menurutnya, kasus yang terus berulang perlu dilihat sebagai persoalan sistem dalam pelak-

sanaan MBG. Artinya, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada pimpinan BGN, tetapi juga harus menyentuh mekanisme pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

Apalagi, program MBG menyangkut anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya.

Kesalahan dalam memastikan keamanan makanan dapat berujung pada dampak kesehatan yang luas.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

Keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat, tetapi juga dari seberapa aman makanan tersebut dikonsumsi.

Jika angka korban terus meningkat, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memperluas cakupan MBG, melainkan bagaimana memastikan program tersebut tidak justru menimbulkan masalah baru bagi penerima manfaat.

Kritik Mahfud tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan BGN. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak harus dibarengi sistem pengawasan yang kuat agar tujuan memberikan makanan bergizi tidak berakhir dengan munculnya kasus keracunan secara berulang. ● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didi, Daenk, Ali.R., Kabiرو Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Sidak Mendes Yandri: Galian C Ilegal di Serang Ancam Sutet Jawa-Bali Ditutup Paksa



KRAGILAN | **Harian Merdeka**

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, perihal adanya galian tanah ilegal dan meresahkan karena abu tanahnya bertebaran membuat nafas menjadi sesak.

Sehingga Mendes PDT Yandri Susanto turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau Sidak ke galian tanah tersebut, di Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Sabtu 12 September 2026.

Hasilnya Yandri langsung mengintruksikan pihak terkait, yaitu dinas perizinan Provinsi Banten melakukan penutupan terhadap galian C ilegal supaya tidak lagi beroperasi di wilayah tersebut.

Diketahui Mendes PDT Yandri Susanto tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan, Kepala DPMPTSP Kabupaten

Serang Wawan Ikhwanudin, dan Camat Kragilan Mujtahidi, serta TNI Polri.

Ketika menuju ke lokasi galian tanah Yandri dua kali memberhentikan kendaraannya, hanya untuk menanyakan truk pengangkut tanah yang ketika itu melintas.

Saat ditanya dua orang sopir ini mengaku hanya sebagai pekerja biasa, untuk bertugas membawa material tanah keluar dari Provinsi Banten.

"Saya sudah lama mendapat laporan dari masyarakat desa, karena mereka tahunya saya ini menteri desa, mengadukan adanya penambangan ilegal. Tadi saya menanyakan kepada supir truk tronton, tanah ini dijual ke Jakarta atau sekitaran wilayah Banten," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu 13 September 2026.

Yandri mengatakan, aktivitas penambangan di wilayah Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, diakuinya memang sudah melanggar peraturan yang berlaku.

Sehingga dirinya menanyakan kepada dinas perizinan dan dinas ESDM Provinsi Banten, yang ternyata aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki izin dan melanggar tata ruang wilayah.

"Hari ini melalui dinas per-

izinan dan ESDM provinsi Banten, tambang ini akan disegel atau ditutup ada dua gerbang semuanya ditutup. Kemudian, kepada pihak yang melakukan hal sama tolong ini perhatikan, supaya tidak seenaknya melanggar aturan," ujarnya.

Dikatakan Yandri, yang menanggung akibat dari aktivitas pertambangan tanah yaitu masyarakat, sebab mereka menghirup abu yang hasilkan dan membuat pernapasan terganggu hingga akhirnya menjadi penyakit.

Selain itu penyebab lainnya ada pada enam tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), yang jaraknya hanya tinggal empat meter dan jika tidak diatasi kemungkinan besar bisa longsor atau rubuh yang membuat listrik Jawa Bali akan gelap.

"Ini ada enam sutet yang jaraknya tinggal empat meter, kalau tidak diatasi kemungkinan bisa longsor atau roboh, kalau terjadi maka Jawa Bali akan gelap maka itu akibatnya sangat banyak. Terlebih karena ini ilegal, maka pajaknya pun tidak masuk ke negara maka harus ditutup," ucapnya.

Kata Yandri, sebelumnya Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Pemprov Banten sudah pernah melakukan Sidak ke galian C di Kragilan ini, hanya saja teguran yang disampaikan tidak diindahkan oleh pemilik aktivitas tambangnya.

"Maka dari itu atas laporan masyarakat saya datang langsung kesini dan langsung ditutup, saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat desa, sudah mengadukan kepada kami," tuturnya. ● (Egi)

Menteri Nusron Luncurkan Program Perintis 10 Hari untuk Urus Tanah Lebih Cepat

KRAGILAN | **Harian Merdeka**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.

Program inovasi layanan yang diluncurkan sejak 17 Agustus 2026 ini memangkas durasi pengurusan peralihan hak atas tanah menjadi jauh lebih cepat dan transparan bagi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi erat antara tiga pilar utama: BPN, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Esensi tugas kita adalah mempermudah urusan rakyat, menjadikan rakyat sebagai raja. Program PERINTIS 10 Hari tidak bisa jalan kalau hanya satu institusi yang bergerak. Tiga pilar ini adalah BPN, Bapenda, dan PPAT harus sama-sama berubah dan berkomitmen," ungkap Nusron dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Minggu, 13 September 2026.

Skema PERINTIS 10 Hari membagi tenggat waktu pengurusan secara terukur pada tiap instansi, yakni Bapenda untuk verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama tiga hari, PPAT untuk menyelesaikan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) selama dua hari, dan Kantor Pertanahan/BPN untuk melakukan Pemrosesan dan penyelesaian akhir sertifikat selama 5 hari.

Guna memastikan kepatuhan standar waktu, Nusron mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) mengumumkan pemeringkatan kinerja PPAT secara berkala setiap bulan. PPAT yang disiplin dan tepat waktu akan diberikan reward, sedangkan rekam jejak tersebut menjadi rujukan publik dalam memilih jasa pembuatan akta.

Selain ketepatan waktu, Kementerian ATR/BPN mendorong integrasi data perpajakan dan pertanahan melalui penyinergian Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) secara daring bersama pemerintah daerah. ● (Egi)





Bamsoet Minta Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok Beri Manfaat Bersama

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Politik & Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong peningkatan kerja sama hubungan ekonomi Indonesia dengan Provinsi Jiangxi, Tiongkok. Memasuki usia hubungan 10 tahun, kerja sama kedua pihak perlu bergerak dari sekadar jejaring bisnis dan transaksi perdagangan menuju business matching, investasi, industrial cooperation, penguatan rantai pasok, serta penciptaan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua negara. Hubungan tersebut memiliki modal kuat karena perekonomian Indonesia dan Jiangxi memiliki kebutuhan serta kapasitas industri yang saling melengkapi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2025 nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai sekitar US\$67,04 miliar, sementara impor dari Tiongkok mencapai US\$87,54 miliar. Sehingga, Indonesia mencatat defisit perdagangan sekitar US\$20,50 miliar dengan negara tersebut. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang hubungan dagang dapat diarahkan agar Indonesia memperoleh manfaat yang semakin besar dari proses industrialisasi dan rantai pasok yang terbentuk.

“Besarnya impor dari Tiongkok menunjukkan kuatnya hubungan ekonomi sekaligus mengingatkan kita bahwa kerja sama harus semakin berkualitas. Kita ingin barang dari Jiangxi masuk ke Indonesia sebagai bagian dari proses produksi, sementara produk Indonesia juga semakin banyak menembus pasar Tiongkok. Karena itu, orientasinya harus bergeser dari China sells to Indonesia menjadi China and Indonesia produce together in Indonesia. Indonesia harus diposisikan sebagai production base, bukan sekadar market,” ujar Bamsoet dalam sambutannya di acara “10th Anniversary and International Business Gala Dinner Perhimpunan Pengusaha Jiangxi Indonesia” di Jakarta, Sabtu malam (12/9/26). ● (Egi)

352 Siswa SD Keracunan Program MBG, Anggota DPR Irma Chaniago Geram Dapur Penyuplai Lalai

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam. Sebanyak 352 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap menu dari program tersebut pada Jumat (11/9/2026).

Insiden yang membahayakan kesehatan ratusan anak ini langsung memantik reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mengaku sangat heran sekaligus geram melihat tragedi keracunan pangan kembali terulang.

Irma menyoroti fakta bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah mengambil langkah preventif dengan menutup sementara (suspend) banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

(SPPG) yang terbukti melanggar standar Laik Higiene dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Kok terjadi lagi ya, padahal sudah cukup banyak yang di-suspend. SDM dari BGN yang ada di SPPG tersebut harus diganti karena tidak bertanggung jawab. Harusnya makanan yang bermasalah tidak bisa keluar dari dapur jika mereka bekerja dengan baik,” tegur Irma keras di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Irma menilai, bobolnya sistem kontrol kualitas (quality control) di dapur penyuplai membuktikan bahwa para pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan tersebut tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan lalai terhadap keselamatan nyawa siswa.

Pasca-menyantap hidangan MBG, ratusan siswa tersebut dilaporkan tumbang secara bersamaan dengan keluhan medis serupa, yakni pusing hebat disertai muntah-muntah.

Ketua Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, memastikan seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis ke-daruratan.

“Tim sudah menuju ke lokasi SPPG dan Puskesmas. Sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini sudah membaik dan diperbolehkan pulang,” ungkap Firman.

Merespons kelalaian fatal ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB, Fathul Gani, memastikan pihaknya akan mengambil langkah penindakan tegas. SPPG yang bertanggung jawab memproduksi dan menyalurkan makanan beracun tersebut akan dijatuhi sanksi penghentian operasi sementara (suspend).

“Ya kalau melihat situasi, otomatis suspend,” tegas Fathul Gani saat ditemui di kompleks Kantor Gubernur NTB. ● (Egi)



Heboh! Isu Rumah Tangga Anggota DPRD Jambi Viral, Tudingan di Medsos Tuai Sorotan

JAMBI | **Harian Merdeka**

Jagat media sosial kembali diguncang isu yang menyeret nama seorang anggota DPRD Jambi.

Persoalan yang awalnya muncul melalui unggahan media sosial itu kini menjadi perhatian warganet setelah beredar narasi mengenai dugaan keretakan rumah tangga hingga tudingan adanya hubungan pribadi dengan pria lain.

Nama Mohd. Rendra Ramadhan Usman, yang disebut sebagai anggota DPRD Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), muncul dalam sejumlah unggahan yang ramai diperbincangkan.

Isu tersebut semakin mencuri perhatian karena pengunggah mengaitkannya dengan seseorang yang disebut sebagai istri sah Rendra. Dalam unggahan yang beredar, terdapat narasi mengenai kondisi rumah tangga yang disebut tengah mengalami keretakan.

"Menurut kronologi dan ulasan yang ibu @ibu_oftwo sampaikan di akun Threads-nya bahwa suaminya rendra91 ada keretakan di rumah tangganya," demikian narasi yang tampak dalam unggahan tersebut.

Tak berhenti di situ, unggahan yang beredar juga memuat tudingan sensitif mengenai dugaan hubungan pribadi dengan seorang pria. Bahkan, pengunggah menampilkan foto seseorang yang disebut memiliki kaitan dengan dugaan tersebut.



Narasi inilah yang kemudian membuat isu tersebut semakin ramai. Warganet mulai memberikan beragam respons, sementara unggahan terkait terus dibagikan oleh sejumlah akun media sosial.

Namun, di tengah derasnya perbincangan, satu hal penting perlu digarisbawahi: tudingan yang beredar tersebut belum terbukti dan masih sebatas klaim dalam unggahan media sosial.

Belum ada bukti terverifikasi yang dapat memastikan kebenaran tudingan tersebut. Begitu pula, materi yang beredar belum cukup untuk menjadi dasar menyimpulkan bahwa dugaan hubungan tersebut benar-benar terjadi.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari Mohd. Rendra Ramadhan Usman mengenai tudingan yang tengah beredar tersebut. ● (Agus)

DPP Golkar Turunkan Surat Sakti Syaiful Millah Resmi Jadi Ketua DPRD Kota Tangernag



TANGERANG | **Harian Merdeka**

Teka-teki mengenai sosok yang akan mengisi posisi Ketua DPRD Kota Tangerang akhirnya terjawab. Saiful Mila resmi ditunjuk Partai Golkar untuk menggantikan almarhum Rusdi Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang.

Penunjukan Saiful Mila tersebut merupakan bagian dari proses pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan DPRD Kota Tangerang.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari DPP Partai Golkar terkait pergantian pimpinan DPRD Kota Tangerang pada Jumat (11/9/2026).

"Alhamdulillah, kemarin kami sudah mendapatkan surat dari ketua umum DPP terkait pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Kota Tangerang," ujar Sachrudin di Gedung DPD Golkar Kota Tangerang, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Sachrudin, surat dari DPP Partai Golkar tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada pihak terkait di tingkat Kota Tangerang.

Ia menyebut, dari enam kandidat yang sebelumnya diajukan dalam proses pergantian tersebut, hanya satu nama yang akhirnya dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menduduki posisi Ketua DPRD Kota Tangerang.

"Setelah ini kami tindak lanjuti, menyampaikan surat-surat dari ketua ke DPRD Kota Tangerang. Hanya satu nama, pimpinan dewan hanya satu (Saiful Mila)," tegas Sachrudin.

Siap Jalankan Amanah

Sementara itu, Saiful Mila menyambut penunjukan tersebut dengan rasa syukur. Politikus yang akrab disapa Abah itu menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai amanah besar.

"Alhamdulillah, ini sebuah amanah yang diberikan kepada saya sebagai ketua. Ini amanah yang harus saya jalankan dengan maksimal," kata Saiful. ● (wil/hmi)

Gelapkan Pajak Rp 3,32 Miliar, Dirut PT GR Diserahkan ke Kejari Jakpus oleh Kanwil DJP



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat telah melimpahkan tersangka berinisial ADW, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT GR, beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana perpajakan senilai Rp 3,32 miliar ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Tinggi

DKI Jakarta menyatakan berkas perkara tersebut lengkap.

Menurut Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat, Ika Priatiningsih, penyerahan tahap kedua ini berlangsung pada Jumat (11/9/2026). Hal ini menyusul terbitnya status P-21 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu (9/9/2026).

PT GR, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pertambangan dan pengeboran eksplorasi, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Perusahaan tersebut diduga dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan tidak lengkap untuk periode Februari 2023 hingga Desember 2024.

Selama periode tersebut, PT GR diduga telah memungut PPN dari sejumlah perusahaan mitra dengan total nilai transaksi mencapai Rp 38,42 miliar. Namun, PPN yang telah dipungut tersebut diduga tidak disetorkan ke kas negara. Dana tersebut diduga dialihkan untuk kebutuhan operasional perusahaan, pembayaran kepada pemasok, dan pelunasan utang usaha.

Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 3.324.509.216. Petugas PPNS Kanwil DJP Jakarta Pusat juga telah berhasil menyita uang senilai Rp 2 miliar yang nantinya akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara.

Tersangka ADW dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ia terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda empat kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. ● (Egi)

Polisi Didesak DPR Usut Tuntas Dalang Kerusuhan Demo

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas dugaan pendanaan untuk menggerakkan massa dalam kerusuhan aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Polisi diminta menelusuri pihak yang berada di balik pendanaan hingga sosok yang disebut sebagai intellectual leader.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penyelidikan perlu dilakukan secara mendalam untuk mengungkap motif dan pihak yang mengendalikan rangkaian

kerusuhan tersebut.

“Penyelidikan mendalam perlu terus dilanjutkan untuk membongkar motif utama di balik aksi kerusuhan tersebut, termasuk menelusuri secara tuntas keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagai dalang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Menurut dia, seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses secara hukum. Hal itu dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi serupa terhadap anak-anak dalam aksi demonstrasi.

“Demi menjaga ketertiban umum dan melindungi masa depan anak-



anak dari eksploitasi serupa,” jelas Habiburokhman.

Habiburokhman juga mengapresiasi Polda Metro Jaya yang mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi serta aliran dana dalam rangkaian keributan tersebut.

Dia menilai pelibatan dan eksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa

merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencederai nilai demokrasi dan ruang penyampaian aspirasi publik.

“Aksi penyampaian pendapat yang semestinya berlangsung damai, tertib, dan bermartabat justru dirusak oleh oknum-oknum yang sengaja memicu kerusuhan demi kepentingan tertentu,” sambung Habiburokhman.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya dugaan pendanaan untuk menggerakkan massa dalam kerusuhan tersebut. Dari pengembangan penyidikan, polisi menemukan pihak yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan,

pemberi order, hingga penyedia dana.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan penyidik juga masih memburu pihak yang diduga menjadi pengendali atau intellectual leader dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

“Selanjutnya dari hasil pengembangan proses penyidikan, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan penyidik Ditres PPA dan TPPO Polda Metro Jaya, kami menemukan fakta hukum terkait dengan pihak-pihak yang melakukan pendanaan dan pergerakan massa,” kata Iman saat konferensi pers, Sabtu (12/9/2026). ● (Egi)

Forum Pimred dan Humas Polri Akan Sinergi Perkuat Perlindungan Wartawan



JAKARTA |
Harian Merdeka

Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (Forum Pimred) dan Divisi Humas Polri sepakat memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi jurnalis yang bertugas di lapangan. Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan jajaran pengurus Forum Pimred ke Kantor Divisi Humas Polri, Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (11/09/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Forum Pimred

Bernadus Wilson Lumi hadir didampingi Ketua Harian Badar Subur, Sekretaris Jenderal Helmy Halim, dan Wakil Sekretaris Jenderal Mercys Charles Loho disambut langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Jhonny Eddizon Isir. Pada kesempatan itu, Forum Pimred menyerahkan cendera mata kepada Kadiv Humas Polri atas kesediaannya menjadi narasumber utama dalam agenda diskusi “Ngobrol Santai” (Ngobras) bersama Forum Pimred dengan tema “Bicara Polisi, Publik, dan Pers”.

Ketua Umum Forum Pimred, Bernadus Wilson Lumi, men-

egaskan pentingnya kerja sama antara media dan kepolisian, khususnya terkait jaminan keselamatan kerja jurnalis di area rawan konflik maupun bencana.

“Kerja sama ini fokus pada keselamatan peliputan di lapangan. Kami ingin memastikan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan aman dan terlindungi,” ujar Bernadus.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap program kerja sama teknis terkait perlindungan dan keselamatan wartawan dapat segera direalisasikan. ● (hmi)

Gelorakan Kecintaan pada Seni Budaya, Kapolri Sambangi Pameran Karya Nasirun di Jakarta

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan pameran Nasirun di Galeri Nasional Indonesia. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia serta dukungan kepada para seniman.

Pameran bertajuk “Bersimpuh di Kaki Para Guru” dibuka di Jakarta Pusat, Sabtu, 12 September 2026. Pameran tersebut menjadi penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang membentuk perjalanan keseniannya.

Nasirun dikenal sebagai pelukis kontemporer Indonesia yang konsisten menghadirkan kebudayaan Jawa dalam berbagai karya. Karya-karyanya juga banyak mengangkat spiritualitas serta persoalan sosial melalui pendekatan seni kontemporer.

Sejumlah karya dari berbagai periode ditampilkan untuk memperlihatkan perkembangan perjalanan artistik Nasirun. Salah



satunya Persembahan untuk Bathara Guru yang diciptakan pada 1999.

Pameran juga menghadirkan Komidi Putar Pasar Malam dari 2010 dan Tahta untuk Petruk dari 2015. Kedua karya tersebut menjadi bagian perjalanan Nasirun memadukan tradisi dengan refleksi terhadap kehidupan sosial.

Karya Realis yang Semurni-murninya dari 2018 turut ditampilkan kepada masyarakat dalam pameran tersebut. Pengunjung juga dapat melihat Kopiah Pertama yang Dilukis Nasirun yang dibuat pada 2023.

Rangkaian karya tersebut menggambarkan proses Nasirun memadukan tradisi, spiritualitas, dan pengalaman sosial sepanjang perjalanan berkesenian. Pendekatan tersebut menghadirkan nilai budaya melalui bahasa seni yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pameran “Bersimpuh di Kaki Para Guru” dibuka untuk masyarakat mulai 13 September hingga 11 Oktober 2026. Masyarakat dapat mengunjungi Galeri Nasional Indonesia sesuai jadwal operasional selama masa penyelenggaraan.

Pada Selasa hingga Kamis, pameran dapat dikunjungi mulai pukul 10.00 sampai 18.00 WIB. Sementara Jumat hingga Minggu, waktu kunjungan berlangsung mulai pukul 10.00 sampai 20.00 WIB.

Pameran tidak dibuka setiap Senin selama berlangsungnya rangkaian kegiatan di Galeri Nasional Indonesia. Pengunjung dapat menyesuaikan rencana kedatangan dengan jadwal yang telah ditetapkan penyelenggara.

Kehadiran Kapolri sekaligus menunjukkan dukungan terhadap seniman yang terus menjaga keberlanjutan budaya Indonesia. Dukungan tersebut mencakup upaya menghormati pendahulu serta menghadirkan nilai tradisi melalui karya kontemporer.

Pameran ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal hubungan seniman dengan para guru pendahulunya. Penghormatan tersebut kemudian diterjemahkan Nasirun melalui karya yang merekam perjalanan panjang serta perkembangan kreativitasnya. ● (Egi)

Dewi Perssik Minta Mahasiswa Tak Cuma Kejar IPK: Bangun Networking Penting!

JAKARTA |
Harian Merdeka

Suasana pembukaan perkuliahan tahun Akademik 2026/2027 Universitas Mercu Buana (UMB) mendadak heboh. Pedangdut Dewi Perssik hadir mengejutkan para mahasiswa baru lewat aksi panggungnya yang energik.

Pemilik nama asli Dewi Murya Agung itu membawakan empat lagu hitsnya, yakni Indah pada Waktunya, Mimpi Manis, Keong Racun, hingga No Comment. Sontak, ribuan mahasiswa baru yang hadir ikut bernyanyi dan berjoget bersama di tengah acara.

Bukan sekadar hadir sebagai bintang tamu, pedangdut yang akrab disapa Depe ini rupanya juga berstatus sebagai mahasiswa semester 2 program studi Psikologi UMB.

Di sela penampilannya, Dewi Perssik sempat membagikan pesan berharga kepada para juniornya. Ia mengingatkan agar masa-masa perkuliahan tidak hanya dimanfaatkan untuk berburu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi, melainkan juga memperluas jaringan sosial.

"Jangan hanya mengejar IPK. Selama kuliah, bangun networking dan kompetensi," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu

“Jangan hanya mengejar IPK. Selama kuliah, bangun networking dan kompetensi,”

Dewi Perssik

(13/9/2026).

Dewi Perssik lalu menjelaskan soal keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi begitu memberikan dampak positif bagi kehidupan pribadinya. Pengalaman hidup, masa-masa sulit pandemi Covid-19, hingga dinamika perkuliahan diakuinya turut membentuk mental menjadi lebih kuat dan mandiri.

"Dampak secara langsungnya jadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih mandiri untuk menjalani kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Selain itu, Depe merasakan betul manfaat belajar ilmu psikologi, tidak hanya dari materi kuliah, tetapi juga dari wawasan yang dibagikan para dosen.

"Pengalaman dari para dosen untuk memberikan pengetahuan tentang sebuah usaha," ujarnya.

Kehadiran Dewi Perssik sebagai mahasiswa aktif sekaligus pengisi acara mendapat apresiasi hangat dari pihak kampus. Dekan Fakultas Psikologi UMB, Laila Meiliyandrie Indah Wardhani, menilai semangat belajar presenter Pagi Pagi Ambyar itu sangat menginspirasi.

"Depe di UMB bukan hanya belajar psikologi, ia berusaha menghidupkan psikologi dalam kesehariannya. Semangatnya untuk memahami psikologi diniatkan untuk membangun bonding dengan putranya. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dapat menjadi bagian dari perjalanan untuk menjadi orang tua yang lebih baik," pungkasnya.

● (dth)





Perumda Tirta Pakuan Salurkan Bantuan untuk Kebakaran TPA Galuga

BOGOR | **Harian Merdeka**

Pemerintah Kota Bogor bersama Perumda Tirta Pakuan menyalurkan bantuan air tangki dan logistik guna mendukung proses pemadaman kebakaran serta memenuhi kebutuhan para petugas di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor, Minggu (13/9/2026).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang telah berpartisipasi memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, vitamin, hingga pasokan air bersih.

"Saya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang bersiaga di Posko UPTD Kota Bogor TPA Galuga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Perumda Tirta Pakuan yang telah mengirimkan bantuan air tangki sejak hari pertama," ujar Jenal di lokasi posko, Minggu (13/9/2026).

Jenal menegaskan bahwa ketersediaan armada tangki air masih sangat dibutuhkan di lokasi hingga kobaran api benar-benar berhasil dipadamkan sepenuhnya. Ia juga meminta dukungan doa dari masyarakat untuk keselamatan para petugas dan relawan di lapangan.

"Kami memohon agar bantuan air tangki terus disiagakan sampai api betul-betul padam. Semoga para relawan dan petugas yang terus berjuang yang juga merindukan keluarga mereka dapat segera pulang setelah api padam sepenuhnya. Terima kasih untuk Tirta Pakuan, semoga seluruh jajaran direksi dan karyawan sehat selalu," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan air bersih dan logistik ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat dan memenuhi kebutuhan dasar para petugas yang berjibaku di TPA Galuga.

Di tengah upaya penanganan kebakaran tersebut, Rino juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut memberikan doa dan dukungan moral. ● (Egi)

Sofyano: Tambah Nozzle dan Percepat Pelayanan SPBU Jadi Solusi Atasi Antrean BBM Subsidi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria.

Sofyano menilai keputusan PT Pertamina Patra Niaga menambah nozzle BBM subsidi di sejumlah SPBU di Makassar merupakan langkah tepat. Namun, menurut dia, penambahan fasilitas tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan percepatan pelayanan dan pembenahan manajemen antrean di SPBU.

"Saya sangat mendukung keputusan Patra Niaga menambah nozzle BBM subsidi di sejumlah SPBU. Ini langkah konkret yang bisa memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat kendaraan keluar dari antrean," ujar Sofyano. Menurutnya, semakin banyak nozzle yang beroperasi, semakin besar pula kapasitas kendaraan yang dapat dilayani secara bersamaan. Dengan demikian, waktu tunggu masyarakat diharapkan dapat ditekan.

Namun, Sofyano mengingatkan bahwa panjang antrean tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah nozzle atau ketersediaan BBM. Kecepatan operator dan tata kelola arus kendaraan juga menjadi faktor krusial.

"Operator SPBU harus lebih sigap. Bukan hanya cepat ketika mengisi BBM, tetapi juga harus cerdas mengatur arus kendaraan masuk, posisi kendaraan saat mengisi dan kendaraan yang keluar. Jangan sampai kendaraan yang sudah selesai mengisi justru menghambat kendaraan berikutnya," katanya.



raan berikutnya," katanya.

Jangan Sampai Antrean Panjang karena Pelayanan Lambat. Sofyano meminta Pertamina Patra Niaga mendorong pemilik dan pengelola SPBU meningkatkan standar pelayanan, terutama ketika terjadi lonjakan antrean.

Menurut dia, dalam kondisi antrean puluhan hingga ratusan kendaraan, keterlambatan beberapa menit saja dapat menciptakan efek berantai.

"Dalam kondisi normal mungkin keterlambatan satu atau dua menit tidak terasa. Tetapi ketika ada puluhan bahkan ratusan kendaraan mengantre, keterlambatan kecil bisa menjadi panjang di belakangnya. Karena itu seluruh proses pelayanan harus dibuat seefisien mungkin," tegasnya.

Ia juga meminta proses pembayaran, termasuk penggunaan mesin pem-

bayaran elektronik, tidak menjadi titik kemacetan baru saat antrean sedang padat.

"Semua faktor yang berpotensi memperlambat proses pengisian BBM harus diminimalkan," ujarnya.

BBM Subsidi Jangan Dijual ke Jeriken Saat Warga Mengantre

Tak hanya soal pelayanan, Sofyano menyoroti pengawasan penyaluran BBM subsidi. Ia meminta praktik pembelian menggunakan jeriken maupun drum diperketat, terutama ketika antrean kendaraan masyarakat sedang panjang.

"Kalau kendaraan masyarakat sedang mengantre panjang, jangan sampai pada saat yang sama BBM subsidi justru dijual ke jeriken atau drum, apa pun alasannya.

Prioritas harus diberikan kepada kendaraan yang sudah berada dalam antrean," katanya. ● (Agus)

Hiswana Migas Bogor Salurkan Bantuan untuk Penanganan Kebakaran TPA Galuga

BOGOR |
Harian Merdeka

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC Bogor menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mendukung penanganan kebakaran lahan di areal TPA Galuga, Minggu (13/9/2026).

Bantuan diserahkan Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keuangan (OK) Hiswana Migas DPC Bogor Untung Kurniadi, didampingi Wakil Ketua II Bidang LPG Hendri Alam, kepada Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, yang didampingi Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bogor Rudy Mashudi.

Bantuan tersebut berupa 1 unit pompa air portable Arkon, 10 tabung LPG 12 kilogram, refill 9 unit APAR, 40 karton air mineral, 15 karton mi instan, serta 10 pak kopi.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Hiswana Migas dalam membantu penanganan kebakaran di TPA Galuga.

“Terima kasih atas dukungan dan kepedulian rekan-rekan Hiswana Migas. Bantuan ini sangat berarti untuk mendukung upaya penanganan di lapangan,”



ujar Jenal.

Jenal menjelaskan, kebakaran yang terjadi sejak 7 September 2026 sebelumnya melanda area seluas lebih dari 3 hektare. Namun, hingga Minggu (13/9), kondisi kebakaran telah jauh

terkendali.

“Dari luasan lebih dari 7 hektare, saat ini titik api sudah dapat dikendalikan dan tersisa sekitar 0,7 hektare yang masih mendapat perhatian khusus,” jelasnya. ● (Egi)

Lahan PSEL Tangsel Masih Menunggu Appraisal



TANGERANG SELATAN |
Harian Merdeka

Proses pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih berproses.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel kini menunggu hasil penilaian harga tanah dari konsultan appraisal independen sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan pengadaan lahan.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, kebutuhan lahan untuk pembangunan

PSEL diperkirakan mencapai sekitar lima hektare. Dari total kebutuhan tersebut, Pemkot Tangsel menargetkan sekitar 2,3 hektare dapat dibebaskan pada 2026.

“Penilaian harga tanah masih menunggu hasil konsultan appraisal independen. Nilainya akan menjadi dasar dalam proses pengadaan lahan,” kata Pilar, Minggu (13/9/2026).

Menurut Pilar, proses pengadaan tanah saat ini berjalan beriringan dengan sejumlah tahapan persiapan lainnya. Pemkot Tangsel juga telah melakukan koordinasi dengan Danantara terkait kebutuhan lahan untuk men-

dukung pembangunan fasilitas PSEL tersebut.

Tahapan yang dilakukan mencakup penetapan lokasi, proses appraisal, hingga persiapan pembayaran kepada pemilik lahan.

Pemkot Tangsel berharap seluruh proses pembebasan lahan dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga pembangunan PSEL dapat segera masuk ke tahap berikutnya.

Ditargetkan Groundbreaking 2026, Beroperasi 2028

Pemkot Tangsel menargetkan pembangunan PSEL dapat memasuki tahap groundbreaking pada 2026. Jika tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut diharapkan mulai beroperasi pada 2028.

Pembangunan PSEL dinilai menjadi salah satu langkah strategis Tangsel dalam menghadapi persoalan sampah yang terus membutuhkan penanganan serius.

Pilar berharap proses pengadaan tanah mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pemilik lahan yang

terdampak.

Ia menegaskan, pembangunan fasilitas tersebut diarahkan untuk kepentingan publik dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan persampahan di Kota Tangsel.

“Harapannya masyarakat pemilik lahan dapat mendukung proses pengadaan tanah ini karena proyek tersebut untuk kepentingan publik, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Tangsel,” ujarnya.

Dengan kebutuhan lahan sekitar lima hektare, pembebasan tahap awal seluas 2,3 hektare menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dituntaskan Pemkot Tangsel. Hasil appraisal independen nantinya akan menjadi salah satu titik krusial sebelum proses pembayaran dan pembebasan lahan dapat dilanjutkan.

Jika target tersebut tercapai, Pemkot Tangsel berharap pembangunan PSEL dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

● (Agus)

PENGAMAT: BEBAN.....

Pengamat pasar keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan Rupiah tidak terlepas dari kembali memanasnya konflik AS dan Iran. Eskalasi tersebut dikhawatirkan mengganggu jalur distribusi energi, terutama minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.

Menurut Ibrahim, risiko gangguan pasokan tidak hanya datang dari Selat Hormuz, tetapi juga jalur strategis lainnya. Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran di kawasan Bab el-Mandeb dinilai berpotensi mengganggu salah satu jalur penting pengiriman minyak dunia setelah Selat

Hormuz.

"Kondisi ini mendorong para pedagang untuk memperhitungkan premi risiko yang jauh lebih tinggi dalam harga minyak mentah," kata Ibrahim dalam risetnya.

Harga Minyak Tembus Level Tinggi

Ketegangan geopolitik tersebut turut mendorong harga minyak dunia kembali meningkat.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 2,89 persen menjadi 107,63 Dolar AS per barel pada pukul 08.45 WIB.

Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,70 persen menjadi 102,75 Dolar

AS per barel.

Lonjakan harga minyak menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Sebagai negara yang masih berstatus net importir minyak, kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan fiskal.

Ibrahim menilai salah satu dampak paling besar berada pada sisi APBN, terutama apabila pemerintah harus meningkatkan subsidi dan kompensasi energi.

"Dampak utama dan beban fiskal yang muncul akibat situasi tersebut adalah pembengkakan subsidi dan kompensasi energi

membuat beban APBN meningkat," tuturnya.

Subsidi BBM dan LPG Berpotensi Membengkak

Ibrahim menjelaskan, apabila harga minyak dunia berada di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN, kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi akan ikut meningkat.

Tekanan tersebut dapat merembet ke berbagai komoditas energi yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk BBM seperti Pertalite dan Solar serta LPG 3 kilogram.

● (Agus)

TEGAKKAN INPRES.....

Jumhur, penegakan hukum dilakukan di tengah ancaman cuaca ekstrem dan kemarau panjang. Pemerintah, kata dia, tidak memberikan toleransi terhadap pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan karhutla dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Dari total 50 badan usaha yang disegel, sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan dengan total area konsesi terbakar mencapai 23.634,72 hektare.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan penindakan terluas, yakni melibatkan 18 badan usaha dengan area terbakar 12.920,88 hektare. Selanjutnya, Kalimantan Selatan mencatat enam badan usaha dengan area

6.476,94 hektare dan Kalimantan Tengah enam badan usaha dengan area 2.684,02 hektare.

Penindakan juga dilakukan terhadap empat badan usaha di Kalimantan Timur dengan area terbakar 1.244,81 hektare serta dua badan usaha di Kalimantan Utara dengan area 308,07 hektare.

Sementara itu, KLH menyegel 14 badan usaha di Sumatera dengan total area terbakar 3.699,07 hektare.

Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 11 badan usaha dengan area terbakar 2.928,28 hektare. Berikutnya Lampung dengan dua badan usaha seluas 758,88 hektare dan Riau dengan satu badan usaha seluas 11,91 hektare.

Selain penindakan terhadap

badan usaha, KLH menyebut Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 orang diduga menyebabkan kebakaran karena kelalaian.

Jumhur menegaskan penegakan hukum terhadap korporasi mengacu pada prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak pemegang izin konsesi sebagaimana ditekankan dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2026.

Baca Juga: KLH Dorong Industri Serahkan Limbah Beracun, Wamen Diaz Apresiasi Peran PPLI

Baca Juga: 21 Badan Usaha Disegel Terkait Karhutla, KLH Bongkar Ancaman Pidana

Pembakar Lahan

Dengan prinsip tersebut, setiap pemegang konsesi wajib bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan.

Selain penyegelan dan sanksi administratif, pelanggar juga dapat menghadapi sanksi pidana serta gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

"Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus bersinergi memantau titik api secara real-time dan tidak akan ragu membawa setiap pelanggar ke meja hijau demi menjamin kepatuhan hukum dan menjaga ruang hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jumhur. ● (Egi)

PRABOWO COPOT PURBAYA.....

Suahasil dalam pelantikan di Istana Negara. Sebelumnya, Suahasil telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.44 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi biru muda.

Berdasarkan pantauan wartawan, Suahasil datang sambil melempar senyum kepada awak media yang menunggu di halaman Istana.

Kedatangan Suahasil terjadi ketika isu reshuffle Kabinet Merah Putih menguat sejak Senin siang. Kepada awak media, Suahasil mengonfirmasi telah menerima telepon dari Sekretariat Presiden untuk mengikuti agenda reshuffle pada sore hari.

"(Sudah) ditelpon," kata Suahasil singkat.

Namun, dia belum memberikan penjelasan mengenai posisi yang akan diembannya dalam perombakan kabinet tersebut.

Kabar mengenai pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah Suahasil dipanggil ke Istana. Purbaya, yang baru sekitar setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, sebelumnya juga terpantau tidak melanjutkan kehadirannya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin siang.

Sebagai informasi, Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum masuk ke Kabinet Merah Putih, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisisioner Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS). Sementara itu, Suahasil merupakan ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970.

Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, kemudian memperoleh gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997, serta PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen FEB UI pada 1999. Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi UI pada 2010. Bidang keahliannya antara lain ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan.

Di pemerintahan, Suahasil pernah menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Ia kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 dan melanjutkan perannya dalam pemerintahan berikutnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul mempertanyakan pencopotan Purbaya yang terkesan dadakan.

"Serba dadakan, lalu salahnya Purbaya dimana? baru 1 tahun menjabat," kata Adib.

● (Egi)

BARCA 'PERKASA' DI PUNCAK

JAKARTA |
Harian Merdeka

Barcelona masih sempurna dari lima pertandingan LaLiga musim ini. Berikut update klasemen Liga Spanyol perkasa untuk sementara.

Barcelona melanjutkan tren positifnya di awal musim ini. Terbaru, pasukan Hansi Flick mengkasak Levante 4-2 di kandang lawannya, Minggu (13/9) malam WIB.

Masing-masing gol Barcelona didapat lewat brace Lamine Yamal dan satu gol

Xavi Espart dan Karim Adeyemi. Levante cuma membalas dua gol masing-masing lewat Ivan Romero dan Brugue.

Hasil itu bikin Barcelona mengemas 15 poin dari lima laga. Blaugrana langsung memimpin di atas Real Madrid,

yang baru mengemas 12 poin usai sempat kalah sekali.

Di peringkat tiga ada Deportivo Alaves dengan 10 poin, yang kalah 1-2 dari Santander akhir pekan lalu. Sementara Atletico Madrid mulai naik ke posisi empat juga dengan 10 poin, usai mengkasak Real Sociedad 3-0 pada Senin (14/9) dini hari WIB.

Sevilla mengekor di posisi lima dengan 10 poin, disusul Deportivo La Coruna (9).

Real Betis di peringkat 7 dengan 9 poin, namun Antony Cs baru akan bertanding melawan Villarreal pada Selasa (15/9) dini hari WIB.

Espanyol, Athletic Bilbao, Santander, Osasuna, dan Sociedad mengemas 7 poin di peringkat 8 hingga 12. Sementara di tiga posisi terbawah sementara dihuni Valencia (1), Elche (2), dan Villarreal, yang baru akan bermain dini hari nanti. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

